

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani merupakan suatu “trade off” bagi para petani. GKP yang terlalu tinggi menyebabkan pedagang atau penggiling tidak bersedia membelinya dengan alasan daya beli konsumen terhadap beras rendah. Pada kondisi ini gabah petani terancam tidak laku dikarenakan harga yang terlalu tinggi, sebaliknya harga yang terlalu rendah membuat petani merugi karena harga jual tidak bisa menutupi biaya produksi.¹

Pada kondisi ini sebenarnya petani enggan menjual gabahnya, namun demikian mereka “dihantui” oleh kebutuhan keuangan (likuiditas) yang mendesak, biaya perawatan gabah jika tetap di simpan, dan kemungkinan rusaknya gabah jika tidak segera menjualnya. Hal ini seperti ditanyakan bahwa petani akan memiliki probabilitas merugi jika mereka menyimpan gabahnya karena harus menanggung “opportunity cost” dan sebaliknya pedagang/penggiling akan memperoleh probabilitas untuk untung karena kemahiran berdagang dan adanya fluktuasi (disparitas) harga. Disparitas harga seperti dinyatakan oleh Jamal Dkk (2006) terjadi karena lemahnya posisi tawar petani dalam perdagangan gabah, kemampuan (teknik) menyimpan petani yang rendah, nilai tambah pengolahan dan

¹ Ahmad Rifa'i, “Faktor penentu harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani di Indonesia Tahun 2005-2010,” *Jurnal Inovasi dalam pembangunan*, Vol. XXVIII No. 2 (Juni,2014), 1334-1664.

perdagangan beras yang hanya dapat dinikmati oleh pedagang, dan sistem pasar yang jauh dari sistem pasar persaingan sempurna.²

Mengikuti teorema Cobweb (“fenomena jaring laba-laba”). Penentuan harga produk-produk pertanian sangat dipengaruhi oleh harga sebelumnya. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan adanya faktor musiman, karena terdapat musim dimana produk pertanian tersebut langka yang akan berpengaruh tinggi rendahnya harga. Pada saat panen raya umumnya harga Gabah Kering Giling (GKP) cenderung rendah. Secara umum penentuan harga gabah juga dipengaruhi oleh harga gabah pada tingkatan yang lain yaitu Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kualitas Rendah (GKR).³

Harga gabah yang diterima petani selama panen raya dan panen gadu tahun ini berkisar Rp 2.000 sampai Rp 2.500 per kilogram untuk kualitas gabah kering panen di tingkat petani. Padahal seharusnya berdasarkan Intruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasaan, harga GKP di tingkat petani adalah Rp 2.640 per kilogram. Realitas jebloknya harga gabah petani menyebabkan beban pembiayaan petani untuk melanjutkan kontinuitas usaha tani dan memenuhi kebutuhan hidup lainnya dipastikan semakin berat. Ironisnya, realitas jatuhnya harga gabah petani selalu terjadi setiap tahun terutama saat panen raya maupun panen gadu.⁴

² Simatupang, Pandjar; Mardianto, Sudi dan Maulana Mohamad. 2013 *Evaluasi Kebijakan Harga Gabah 2014*.

³ Miller, Roger Leroy dan Meiners, Roger E, 200. *Teori Mikro ekonomi Intermediate* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

⁴ Mas'un, "Ekonometrika Pertanian, November 04, 2010. <http://cetak.kompas.com/read/2010/08/02/16472494/kinerja.perlindungan.harga.gabah.petani>.

Selama delapan tahun berakhir, intruksi presiden (inpres) perberasan belum pernah secara fundamental dikoreksi. Mulai inpres Nomor 9 Tahun 2002 hingga yang terakhir Inpres Nomor 7 Tahun 2009, perubahan penting yang terjadi hanyalah menyesuaikan besaran harga pembelian pemerintah (HPP), Sedangkan substansi lainnya tidak mengalami perubahan yang berarti. Padahal, jebloknya harga gabah petani tidak semata disebabkan oleh nilai HPP yang tidak relevan lagi dengan realitas, tetapi lebih luas akibat implementasi kebijakan makro agroekonomi yang belum sepenuhnya memihak kepentingan petani. Inpres perberasan adalah salah satu instrumen yang dipilih pemerintah untuk melindungi harga gabah petani dari kejatuhan harga. Ironisnya instrumen ini belum sepenuhnya memihak petani. Persyaratan kualitas gabah agar memperoleh HPP, misalnya, kadar air maksimal 25 persen dan kadar hampa/kotoran maksimal 10 persen untuk kualitas gabah kering panen (GKP) faktanya, sulit bisa dicapai oleh petani. Alhasil banyak gabah petani terpaksa dihargai dengan harga rafaksi, yaitu mengurangi HPP sebanding dengan tingkat penurunan kualitas gabah.⁵

Distorsi dalam penerapan HPP tidak saja merugikan petani sebagai produsen, tetapi juga merugikan masyarakat sebagai konsumen pasalnya, hal tersebut memicu disparitas harga gabah dan harga beras menjadi semakin besar. Kenyataan ini menguatkan implementasi Inpres perberasaan cenderung menguntungkan para pedagang, pemilik

⁵ Mas'un, "Ekonometrika pertanian, November 04, 2010. <http://cetak.kompas.com/read/2010/08/02/16472494/kinerja.perlindungan.harga.gabah.petani>. di unduh pada Senin, 23 Januari 2017, pukul 12.30 WIB

penggilingan, dan pelaku bisnis perberasan lainnya, tetapi kurang memihak kepada kepentingan petani dan konsumen.

Bahkan telah ada pada zaman Rasulullah SaW Dalam salah satu sumber Hukum Islam (Hadist) terdapat satu hadist yang mencatat percakapan para sahabat Rasulullah dengan beliau. Para sahabat tersebut berinisiatif meminta otoritas pemerintahan Islam pada waktu itu untuk turun tangan menurunkan harga barang yang menggila pada waktu itu, karena ada ketimpangan antara supply yang rendah dengan demand yang minimal konstan . Harapannya adalah dengan penetapan sepihak dari otoritas, maka harga dipasar akan tunduk kepada keputusan tersebut.

Penentuan harga gabah ini jika kita kaitkan otoritas yang berwenang telah dengan semena-mena dan sengaja menetapkan harga yang menimbulkan kerugian di pihak petani yang membuka terjemahan suatu aksi yang merupakan konspirasi negara termanajemen yang meneror jiwa para petani dan harta mereka. Alhasil jika harus ditetapkan pemerintah, harga gabah yang ideal adalah yang memihak petani dan masyarakat secara umum untuk jangka waktu sampai panen berikutnya.⁶

Dalam menaksir pendapatan petani dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah HPP bahwa sebenarnya kualitas gabah (GKG, GKP, Rendah) menentukan hasil pendapatan oleh seluruh petani. Namun realita di lapangan Harga Gabah di Provinsi Banten yang merupakan tempat peneliiian bagi penulis tidak mengacu terhadap

⁶ Nurkholis Ghufron, "Jakarta, 1 April., 2016.

Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Tentunya semua kualifikasi kualitas gabah mempunyai harga yang berbeda. Akan tetapi pada setiap musim panen raya jika harga gabah meningkat kemudian pendapatan petani rendah ini hal yang harus kita telaah apakah ada faktor yang bisa menyebabkan pendapatan petani rendah dengan harga yang tinggi sesuai dengan kualitas gabah.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan petani penulis memfokuskan atau meneliti harga di lapangan dan pendapatan petani di Provinsi Banten, yang merupakan sumber pertanian yang ada di Provinsi Banten dan juga mayoritas masyarakat berkedudukan sebagai petani. Dalam segala bentuk persoalan yang telah dipaparkan diatas bahwa tentu melakukan prediksi dan antisipasi atas apa yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, terutama yang berkaitan dengan harga kualitas gabah (GKG, GKP, Rendah) dan aspek pendapatan sehingga pendapatan petani sesuai apa yang diharapkan.

Pada dasarnya pemerintah terlibat dalam menentukan harga produk hasil pertanian dengan ingin meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya maupun keadilan dalam distribusi pendapatan dalam menentukan beberapa banyak barang yang dibeli oleh individu dan mereka hanya akan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh secara pribadi , sehingga kesempatan barang tersebut yang tersedia akan sangat kecil. Pemerintah akan terlibat dalam penyediaan barang untuk memproteksi masyarakat dari penipuan, kepastian tersedianya produk, maupun keseragaman kualitas dari produk. Semua keterlibatan

pemerintah tersebut ditunjukkan untuk mencapai penentuan harga yang efisien.

Berdasarkan latar belakang diatas, dalam penelitian ini penulis mencoba untuk melihat ada tidaknya pengaruh harga gabah berdasarkan kualitas, yang direfleksikan melalui sebuah penelitian yang berjudul *“Pengaruh Kebijakan Harga Gabah berdasarkan kualitas terhadap pendapatan petani di Provinsi Banten tahun 20013-2015”*

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan suatu cara bagaimana ketika melihat, menduga, memperkirakan, dan menguraikan serta menjelaskan apa yang telah menjadi masalah. Ada beberapa perkiraan penulis terhadap penelitian sebagai berikut:

1. Harga gabah yang telah ditetapkan tidak menjadi acuan oleh para pembeli gabah.
2. Masyarakat enggan menjual hasil panennya jika harga gabah stabil.
3. Pendapatan petani menjadi meningkat tinggi jika harga gabah sesuai dengan yang diharapkan para petani.

C. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak meluas dari yang diharapkan, maka per masalah dibatasi dengan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan yaitu dari Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Banten.

2. Kegiatan penelitian dilakukan pada alat bantu berupa data sekunder yang sudah ada dari situs BPS Provinsi Banten
3. Bagian yang menjadi fokus masalah adalah kebijakan harga gabah berdasarkan kualitas (GKG, GKP, Rendah) di lapangan.
4. Kulit Gabah yang penulis batasi adalah Gabah Kering Giling (GKG), Gabah Kering Panen (GKP), Rendah

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perlu pembahasan khusus dalam penelitian ini. Maka dari itu penyusun merumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh antara harga kualitas gabah (GKG, GKP, rendah) terhadap pendapatan petani?
2. Bagaimana pengaruh kebijakan harga gabah berdasarkan kualitas (GKG, GKP, rendah) terhadap pendapatan petani?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menyatakan hasil yang ingin dicapai setelah penelitian dilakukan Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara harga gabah berdasarkan kualitas terhadap pendapatan petani.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh harga gabah berdasarkan kualitas terhadap pendapatan petani.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana. Selain itu hasil penelitian yang sudah dilakukan diharapkan akan menambah pengetahuan, menjadi sarana pengembangan berfikir ilmiah dan rasional dalam mengkaji bidang keahlian yang dipelajari serta diharapkan dapat diimplementasikan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini memberikan tambahan referensi dan pengetahuan baru tentang pendapatan petani, agar dapat menjadi sumber inspirasi dan bahan kajian di masa yang akan datang.

3. Bagi Subjek Penelitian

Dengan ditelitinya harga gabah berdasarkan kualitas maka akan mengetahui pengaruhnya yaitu harga gabah berdasarkan kualitas terhadap pendapatan petani.

G. Kerangka Pemikiran

Petani merupakan salah satu pelaku terkait yang berperan dalam meningkatkan produksi. Petani seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Perkembangan sampai saat ini petani selalu menjadi pihak yang dirugikan. Hal ini ditunjukkan dengan biaya produksi yang tinggi, tetapi tidak diimbangi dengan harga jual hasil panen yang tinggi. Pendapatan petani tidak meningkat, bahkan tidak cukup untuk

menutupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain untuk biaya produksi selanjutnya petani juga perlu memikirkan keberlangsungan hidupnya.

Pemerintah berusaha menolong petani dengan membuat kebijakan. Salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah adalah kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) nasional terhadap gabah yang dulu dikenal dengan Harga Dasar Gabah (HDG). Perubahan HDG menjadi HPP sangat mendasar karena dengan kebijakan HPP, pemerintah tidak lagi berkewajiban dan tanggung jawab untuk menjamin harga dasar gabah minimum pada tingkat harga tertentu, sebagaimana lazimnya pada konsep kebijakan HDG. Pemerintah dengan kewajiban HPP tidak wajib membeli gabah dari petani. HPP berlaku di gudang Bulog bukan di tingkat petani.⁷

Kebijakan Harga Dasar Gabah pada era Orde Baru, stabilitas harga gabah atau beras merupakan faktor utama penjamin stabilitas ekonomi dan politik nasional. Ketidakstabilan harga beras dapat dilihat dari dua sisi yang berbeda, yaitu (i) ketidakstabilan harga beras antar musim yaitu perbedaan harga antara musim panen dengan musim peceklik, (ii) ketidakstabilan antar tahun karena pengaruh iklim seperti kekeringan atau banjir, fluktuasi harga beras di pasar internasional yang keduanya sulit diramalkan. Stabilitas harga melewati batas musim dan tahun, sehingga diperlukan kebijakan untuk menstabilkannya.

Penurunan sektor pertanian dalam perekonomian disebabkan oleh permintaan terhadap hasil pertanian yang lambat perkembangannya dan kemajuan teknologi di sektor pertanian. Tingkat

⁷ Pantjar Simatupang. 2003. *Harga Dasar Gabah*, Suara Pembaruan. 28 Januari

permintaan barang industri jauh lebih cepat dibanding dengan harga barang pertanian sehingga kenaikan harga barang industri juga jauh lebih cepat dibanding dengan harga barang pertanian. Di negara maju kemajuan teknologi berimplikasi terhadap sektor pertanian yaitu mendorong perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri dan teknologi telah menimbulkan masalah kelebihan produksi pertanian cenderung untuk tetap berbeda pada tingkat yang sangat rendah. Pada kondisi ini jangka pendek harga hasil pertanian cenderung berfluktuatif, ketidakstabilan harga tersebut bisa disebabkan oleh permintaan dan penawaran terhadap barang pertanian yang sifatnya tidak elastis.

Penetapan harga dasar dievaluasi setiap tahun. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap pendapatan petani, produksi padi, inflasi dan harga penjualan beras (Bulog) serta besarnya beban yang harus dipikul oleh pemerintah. Penetapan harga batas tertinggi selalu mempertimbangkan bagaimana laju inflasi dan pengaruhnya terhadap perdagangan antar tempat dan antar waktu. Harga batas tertinggi ditetapkan berdasarkan harga dasar ditambah dengan biaya-biaya pemasaran seperti biaya pengolahan, penyimpanan serta ditambah dengan keuntungan yang wajar bagi pedagang sesuai dengan jasa yang diberikannya.⁸

Pemerintah memberlakukan regulasi harga dalam perdagangan gabah. Hal ini dikarenakan Gabah atau Beras merupakan komoditi vital di Indonesia. Kemudian muncullah istilah-istilah khusus yang megacu

⁸ Mila Yulisa, *Efektifitas Penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Terhadap Pendapatan Petani*, Institut Pertanian Bogor, 2013

pada kualitas gabah sebagai referensi penentuan harganya sebagai berikut:

1. Gabah Kering Panen (GKP), merupakan gabah yang mengandung kadar air 18% tetapi kurang dari 25%.
2. Gabah Kering Giling (GKG), merupakan gabah yang mengandung kadar air maksimal 14%, kotoran atau hampa maksimal 3%, butir hijau atau mengapur maksimal 5%, butir rusak maksimal 3%, dan butir merah 3%.
3. Gabah Rendah, adalah gabah yang mengandung kadar air 14% tetapi lebih kecil atau sama dengan 18%.

Ilmu ekonomi umum menjelaskan bahwa kebijakan harga merupakan instrumen yang dapat dimanfaatkan pemerintah untuk menjamin harga minimum suatu komoditas ditingkat produsen. Kebijakan ini umumnya diterapkan pada komoditas pertanian yang mempunyai pola panen fluktuatif, dan biasanya melindungi para petani dari harga yang merosot tajam pada saat panen raya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat memberikan pemahaman dan gambaran yang sistematis dan mudah, maka penulis mencanmtumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II Kajian Teori, terdiri dari Harga, Penetapa Harga, Kualitas gabah, Pendapatan, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, dan Hipotesis.

BAB III Metode Penelitian, terdiri dari Ruang Lingkup Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data, dan Uji Hipotesis.

BAB IV Pembahasan dan Hasil Penelitian, terdiri dari Gambaran Umum Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian.

BAB V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran-saran.